

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

LAPORAN TAHUNAN

2017

Laporan tahunan SPI 2017

SPI sebagai pengawas internal yang ada dalam satker telah membuat catatan-catatan yang mungkin dapat membantu satker dalam memperbaiki sistem kerja yang ada agar bisa menjadi lebih baik, efisien dan efektif.

Dalam laporan ini ada beberapa hal yang menurut pertimbangan menjadi poin-poin yang perlu sesegera mungkin untuk dikoordinasikan dan diperbaiki. Area tersebut adalah area pengawasan kebijakan dan program, dan pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang milik negara.

Dalam area pengawasan kebijakan, ada beberapa hal yang sudah sesuai dengan kebutuhan. Seperti kebijakan dalam penguatan jam kerja pegawai dan jam kerja bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN), walaupun untuk PPNPN masih menjadi perdebatan tentang posisinya di lembaga, karena dari MenPAN tidak mengakui, karena tidak ada PP yang menyebutkan tentang itu, di lain pihak dari Ditjen Penganggaran Kemenkeu mengeluarkan peraturan untuk pembayaran PPNPN.

Dalam area program, yang menjadi permasalahan adalah kurangnya sounding program kerja nasional yang juga harus dilakukan oleh satker, hal ini terkesan program kerja nasional seperti suatu program dadakan. Sebaiknya untuk informasi mengenai prokernas sudah dibicarakan minimal 2 tahun antara kementerian dengan satker yang terlibat. Karena untuk menyiapkan sumber daya memerlukan penanganan yang baik baik dari segi manusia maupun kapital.

Dalam area kepegawaian, perlu adanya koordinasi yang lebih baik dalam penetapan surat tugas baik yang dibuat di teknis maupun di umum, karena hal ini menimbulkan munculnya surat tugas ganda yang memerlukan waktu tambahan dalam melakukan revisi dan validasi ulang, ini menjadi lebih sulit karena para pimpinan yang banyak bertugas karena padatnya jadwal kegiatan yang ada.

Untuk area keuangan, kendala yang timbul adalah nama petugas kegiatan belum tentu sama dengan yang berangkat bertugas, hal ini terjadi karena revisi surat tugas yang terlambat diinformasikan.

Untuk area barang milik negara, perilaku pengguna barang milik negara yang belum terlalu menguasai penanganan permasalahan yang timbul terutama dengan barang elektronik seperti laptop. Hal ini mengakibatkan umur penggunaan alat-alat tersebut menjadi pendek.

Demikian laporan tahun 2017 yang telah dihimpun oleh Tim SPI sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang telah diberikan.